

ABSTRAK

Peningkatan masyarakat Bangsa Indonesia mengakibatkan tanah menjadi terbatas. Dalam pembangunan Kepentingan Umum dibutuhkan lahan untuk menjadi wadah nya. Keterbatasan tanah mengakibatkan proses Pembangunan untuk Kepentingan Umum harus menjadi terhambat. Oleh karena itu pemerintah berusaha agar proses pembangunan untuk Kepentingan umum ini tetap berjalan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang. Dan mengetahui apa saja hambatan yang terjadi saat proses pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang, dan solusi yang digunakan untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol batang-semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk pengumpulan data menggunakan cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Untuk metode analitis yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis yaitu bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang secara umum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Proses pelaksanaannya yaitu dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dan ada beberapa hambatan dan solusinya yang terkait adanya Pihak Ketiga, Sengketa Keluarga dan Tanah Wakaf, solusinya tim pelaksana pengadaan tanah melakukan pendekatan secara langsung ke pihak yang memiliki tanah.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum,



ABSTRACT

The increasing of Indonesian population causes the limited land. It is necessary a space for the developing of public interest. The limited land becomes an obstacle for the developing of public interest. Therefore, the government attempts to keep working in the developing of public interest.

This research aims to describe the process of the land procurement in constructing of the highway Batang to Semarang and to know the obstacles and the solution that used to be solved that occur during describe the process of the land procurement in constructing of the highway Batang to Semarang.

The research method used was an empirical juridical approach with specification of descriptive analytical research. Besides, primary data and secondary data used a source of data. The analytical method used was qualitative. The result of the research shows that the process of the land procurement for developing public interest in constructing of the highway Batang to Semarang had been accordance with the Law No.2 of 2012 about the Land Procurement in the Public Interest (Land Procurement Law). The conducting process starts from the planning, preparation, implementation and submission stages. Besides, there were several obstacles and a solution related to the existence of third parties, family disputes and land waqf. To solve the problem, the team of the land procurement should make a direct approach to the party who owns the land.

Keywords : Implementation, Land Procurement, Public Interest

